

# **BAB I**

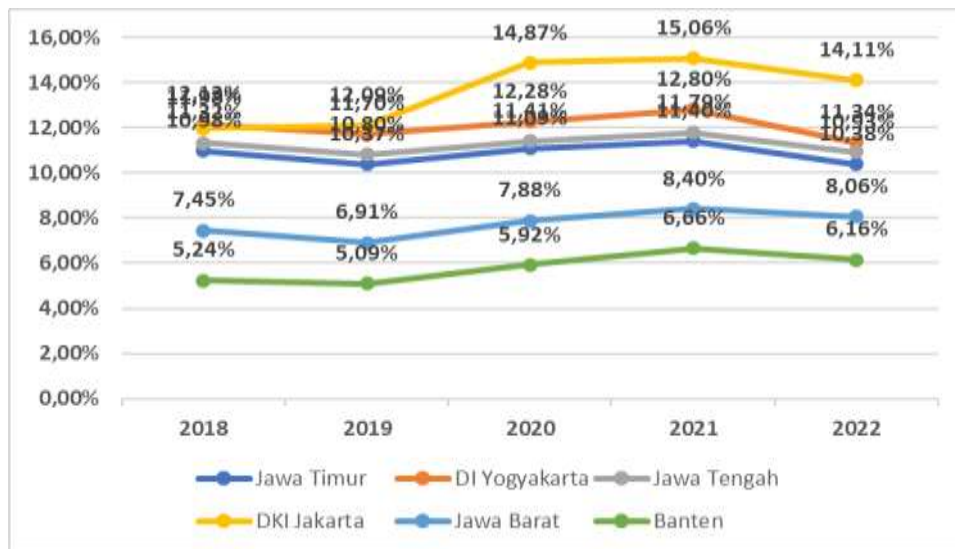
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan permasalahan perekonomian yang sering terlihat pada tiap daerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk menemukan solusi modern bagi masalah kemiskinan yang sudah berlangsung lama. Ada tiga hal yang mencirikan kemiskinan di Indonesia. Pertama, Banyak orang rentan terhadap kemiskinan, tetapi mereka tidak dianggap miskin karena sebagian besar keluarga hidup di bawah ambang kemiskinan nasional. Kedua, garis kemiskinan ditentukan dengan mengukur pendapatan, yang berarti bahwa tingkat kemiskinan yang sebenarnya tidak dipertimbangkan, karena indikator pembangunan manusia yang rendah dan kurangnya akses ke layanan dasar, banyak orang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ketiga, kemiskinan di Indonesia ditunjukkan oleh perbedaan antar wilayah, karena wilayahnya sangat beragam dan luas (Ristika et al., 2021)

Kemiskinan adalah masalah umum di sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagian orang tidak mampu mengatur kehidupan mereka secara manusiawi, yang menyebabkan kemiskinan (Purnama, 2017). Akibatnya, sumber daya manusia berkualitas tinggi yang tersedia menjadi lebih sedikit, sehingga mengurangi pendapatan dan produktivitas. Rendahnya tingkat pengetahuan, dan sumber daya manusia yang tidak memadai, ketidaktahuan akan sektor-sektor ekonomi yang sedang berkembang, dan standar hidup yang rendah adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan.

### Presentase 1.1 Tingkat Kemiskinan di Enam Provinsi di Pulau Jawa



Sumber: BPS 2022 (data diolah)

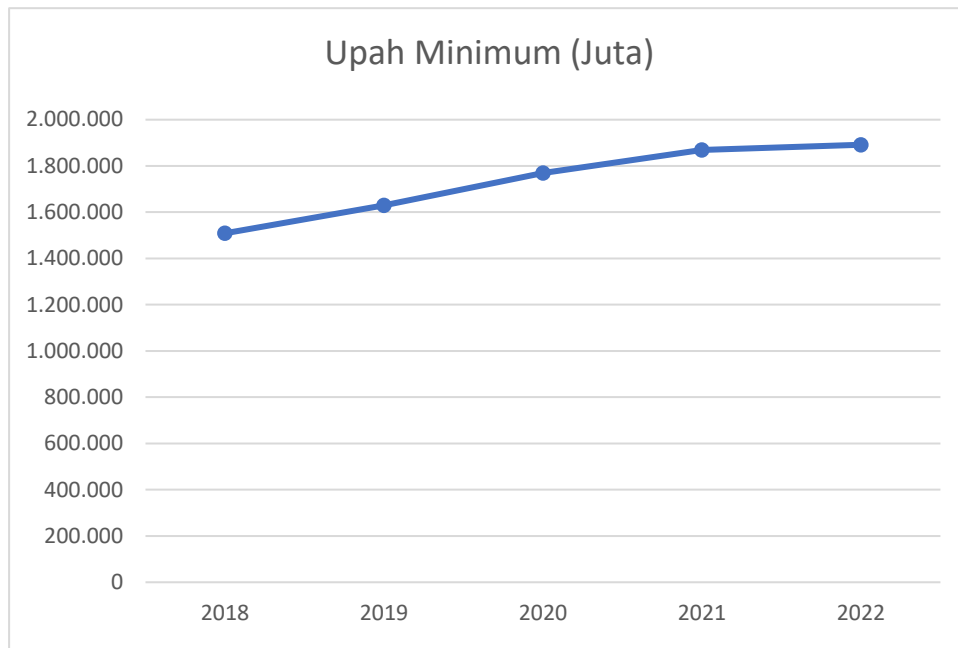
Selama lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan Provinsi Dari 10,98% di tahun 2018 menjadi 10,37% di tahun 2019, terjadi penurunan sebesar 0,61% di Jawa Timur. Namun saat tahun 2020, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur terjadi lonjakan yang awalnya 0,72% menjadi 11,09%. Persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan sedikit meningkat pada tahun 2021, naik menjadi 11,40% dari tahun sebelumnya sebesar 0,31%. Meskipun demikian, pada tahun 2022, tingkat kemiskinan menurun secara signifikan sebesar 1,02%, menjadi 10,38%.

Dengan data pada tahun 2018 hingga 2022, kemiskinan di Jawa Timur telah berkembang menjadi masalah sosial ekonomi yang rumit dan sulit diatasi. Ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan pendapatan, dan mengurangi kualitas sumber daya manusia. Solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan harus mencakup pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat.

Ada banyak jenis kemiskinan yang berbeda, seperti kemiskinan alam, budaya, dan struktural. Kemiskinan struktural adalah hasil dari sistem yang memberikan keuntungan bagi sebagian kelompok masyarakat dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemiskinan kultural ditandai dengan pola hidup berfoya-foya, tidak mempunyai tabungan, dan sikap tidak mau berusaha untuku keluar dari keadaan yang miskin. Karena budayanya, Indonesia memiliki persentase penduduk miskin yang terus meningkat. Pada akhirnya, peningkatan setiap aspek kehidupan masyarakat diperlukan untuk mengurangi kemiskinan (Alviannor & Fahrati, 2021).

Tingkat kemiskinan ditentukan oleh kebijakan upah minimum juga. Pemerintah menggunakan kebijakan upah minimum untuk menimalisir kemiskinan dengan menghitung kebutuhan dasar dan jaring pengaman sosial, seperti makanan, pakaian, dan transportasi. Kebijakan ini terdiri: gaji bulanan, gaji pokok dan tunjangan tetap. Upah ialah kompensasi bayaran kepada karyawan sementara atau harian sesuai dengan kontrak kerja tertulis. Posisi, status, dan tingkat kepuasan kerja karyawan akan meningkat dengan upah yang lebih tinggi, yang selanjutnya akan meningkatkan kebahagiaan kerja (Hasibuan & Handayani, 2021).

### Presentase 1.2 Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS 2022 (data diolah)

Upah minimum di Jawa Timur selama 2018-2022 fluktuatif. Di 2018, upah 1.508.895 juta, naik 8,02% di 2019 menjadi 1.630.059 juta. Pada 2020, terjadi kenaikan lagi 8,5% menjadi 1.768.777 juta. Di 2021, kenaikan lebih sedikit, 5,7%, menjadi 1.868.777 juta. Dan pada 2022, upah minimum naik 1,22% menjadi 1.891.567 juta.

Data ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur terdapat korelasi dengan penetapan upah minimum. Peningkatan upah minimum diperlukan untuk memberi pekerja lebih banyak kesempatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa peningkatan upah minimum selalu sebanding dengan peningkatan produktivitas dan kondisi ekonomi saat ini.

Masalah tingginya angka kemiskinan juga berasal dari fakta bahwa lapangan pekerjaan tidak tersedia untuk memenuhi permintaan angkatan kerja

yang terus bertambah, yang pada akhirnya mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan. Sukirno mendefinisikan pengangguran sebagai keadaan ketika seseorang secara giat mencari pekerjaan dengan upah tertentu akan tetapi belum menemukannya (Sukirno, 2004).

### Presentase 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS 2022 (data diolah)

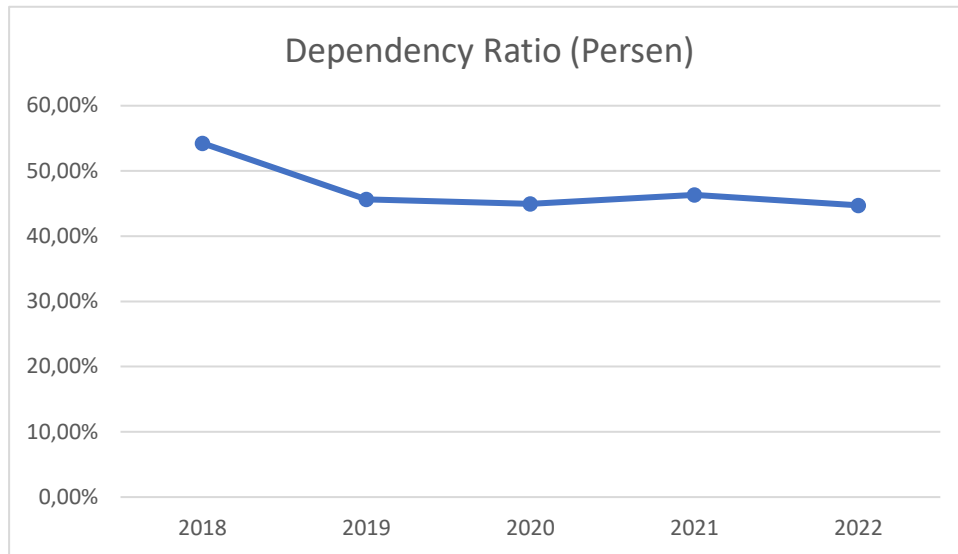
Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan fluktuasi. Tingkat pengangguran sedikit menurun dari 3,91% pada tahun 2018 dan manjadi 3,82% saat tahun 2019. Akan tetapi, Pandemi pada tahun 2020 mengakibatkan peningkatan tajam pada tingkat pengangguran menjadi 5,84%. Bahkan setelah turun menjadi 5,74% pada tahun 2021, tingkat pengangguran tetap lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran mencapai 5,49%.

Data menunjukkan hubungan yang jelas antara tingkat pendapatan dan tingkat pengangguran. Pendapatan masyarakat cenderung menurun sebagai

respons terhadap tingkat pengangguran yang tinggi, dan tingkat kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh hal ini.

Masyarakat secara langsung terkena dampak dari pengangguran, yang merupakan masalah ekonomi makro yang serius. Salah satu hal yang dapat mengubah kemakmuran ialah tingkat pendapatan yang lebih besar. Pendapatan pasti meningkat jika tingkat pemanfaatan tenaga kerja terealisasi sepenuhnya, Karena pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, maka pengangguran dapat memiliki efek berjenjang yang mengurangi kemakmuran. Sebuah masyarakat lebih rentan untuk terlibat dalam siklus kemiskinan dan mungkin mengalami lebih banyak masalah, seperti perselisihan politik dan sosial, semakin rendah tingkat kemakmurannya karena pengangguran (Sukirno, 2010).

Indikator Ekonomi suatu negara dikatakan baik ditentukan oleh rasio ketergantungannya. Indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dapat diperoleh dari rasio ketergantungan. Sementara pendapatan masyarakat yang rendah atau pertumbuhan ekonomi yang lambat terhambat oleh rasio ketergantungan yang besar, Rasio ketergantungan yang rendah dapat mengarah pada pembangunan ekonomi yang lebih kuat. Hal ini agar semua pendapatan-yang digunakan untuk produksi bagi kaum muda dan lansia yang memiliki pekerjaan yang layak-dapat ditabung dan diinvestasikan semaksimal mungkin.

**Presentase 1.4 *Dependency Ratio* di Provinsi Jawa Timur**

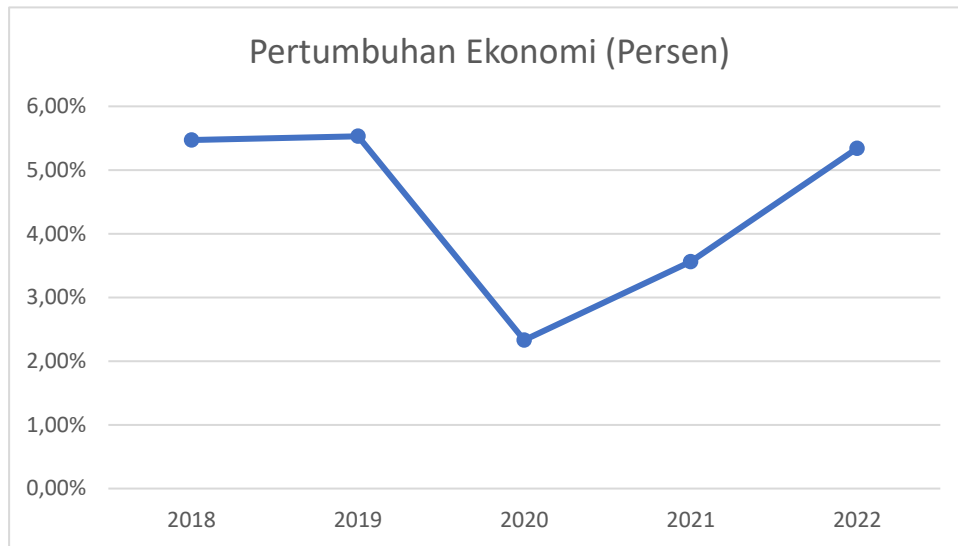
Sumber: BPS 2022 (data diolah)

Pada periode 2018-2022, Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi dalam angka *dependency ratio*, yang menggambarkan persentase orang dalam populasi yang tidak produktif dibandingkan dengan mereka yang produktif. Tahun 2018 mencatat angka 54,25%, kemudian turun menjadi 45,63% pada 2019 dan 44,96% pada 2020. Walaupun kembali naik ke 46,31% di tahun 2021, angka tersebut menurun lagi menjadi 44,73% di tahun 2022. Perubahan ini menunjukkan dinamika proporsi penduduk produktif dan tidak produktif di Jawa Timur.

*Dependency Ratio* yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan negara berkembang, termasuk Indonesia, karena sebagian pendapatan kelompok produktif harus dipergunakan guna mencukupi kebutuhan individu yang tidak memproduksi apa pun. Mobilisasi anggaran dan dana pemerintah untuk investasi produktif lebih mudah dilakukan di daerah dengan populasi yang lebih kecil. Jika rasio ketergantungan rendah, makanan dan bahan mentah lainnya dapat disimpan

dan penduduk berkualitas tinggi dapat tetap hidup. Ini meningkatkan harapan hidup di daerah tersebut (Rohana et al., 2017)

**Presentase 1.5 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur**



Sumber: BPS 2022 (data diolah)

Perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2022 ditunjukkan oleh data diatas, yang mengungkapkan berbagai pencapaian selama periode tersebut. Saat tahun 2018 serta tahun 2019, pembangunan ekonomi tumbuh masing-masing 5,47% dan 5,53%. Namun, ketika epidemi COVID-19 merebak pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi turun tajam menjadi 2,33%. Meskipun ekonomi mulai pulih pada tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan 3,56%, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,34% pada tahun 2022..

Data ini menunjukkan peran penting yang dimiliki oleh produktivitas dalam pembangunan ekonomi oleh masyarakat Jawa Timur. Faktor terpenting dalam penurunan kemiskinan adalah pembangunan ekonomi, yang menunjukkan bagaimana ekonomi berkembang untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi. Dengan kata lain, produktivitas faktor-faktor produksi berhubungan dengan



pertumbuhan ekonomi, dan upah pekerja berhubungan dengan produktivitas pekerja. Fakta bahwa ekonomi Indonesia saat ini berkembang adalah bukti kemakmuran variabel-variabel produktif yang berkontribusi terhadap kemakmuran tersebut. Ketika aktivitas ekonomi meningkat di atas tingkat sebelum krisis, suatu perekonomian dianggap tumbuh atau berkembang (Purnama, 2017).

Informasi latar belakang yang diberikan di atas menunjukkan bahwa peneliti sangat ingin membicarakan dan menyelidiki topik ini di bawah dengan judul **“Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, *Dependency Ratio* Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah *Dependency Ratio* berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah Tingkat Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuannya mengetahui pengaruh bagaimana tingkat kemiskinan di Jawa Timur dipengaruhi upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, *dependency ratio*, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Upah Minimum berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui *Dependency Ratio* berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

### 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penggunaan deret waktu untuk penelitian berikut mencakup Provinsi Jawa Timur dari 2010 hingga 2022.
2. Variabel dependen untuk penelitian ialah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel independen diantaranya upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, *dependency ratio* dan pertumbuhan ekonomi.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam melakukan ini, baik secara akademis maupun praktis. Berikut manfaat yang diberikan peneliti:

### **1) Manfaat Praktis**

Temuan penelitian ini diharapkan bisa memperjelas hubungan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dalam menyusun strategi atau kebijakan untuk memerangi kemiskinan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dapat mengacu pada temuan-temuan penelitian ini.

### **2) Manfaat Teoritis**

- a) Diharapkan bahwa studi ini dapat memperdalam pemahaman para akademisi mengenai strategi yang digunakan di Provinsi Jawa Timur untuk memerangi kemiskinan..
- b) Diharapkan agar dengan menjadi referensi untuk penelitian di masa depan, temuan penelitian ini dapat membantu peneliti/mahasiswa lain menjadi lebih berpengetahuan. Hal ini akan mencakup penerapan ide dan informasi dari ruang kelas dan membandingkannya dengan situasi aktual di tempat kerja.